

Strategi dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan umkm

Haris Ahmad Rizal^{1*}, Maulana Rifai², Gungun Gumilar³

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*Email: harisahmadrizal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam menerapkan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah disingkat UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung, untuk menampung dan sedikit referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat khususnya pelaku UMKM dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan tersebut yaitu dengan studi pustaka, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, pengumpulan data dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduction data (reduksi data), display data (penyajian data), conclusion drawing/verification (verifikasi). Hasil kajian artikel yaitu dalam melaksanakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung dengan indikator Teori Strategi Stephen P. Robbins masih dalam proses cukup baik.

Kata Kunci: Dinas koperasi; ukm; kabupaten bandung; umkm

Strategi dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan umkm

Abstract

This study is intended to find out how the government's strategy in implementing empowering Micro, Small and Medium Enterprises abbreviated is carried out by the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Bandung Regency, to accommodate and a few references to solve problems that exist in society, especially Micro, Small and Medium Enterprises and the government. The method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used by researchers in analyzing the problem are literature studies, and field studies consisting of observations, interviews, and documentation data collection. Activities in data analysis are data reduction (data reduction), data display (data presentation), conclusion drawing/verification (verification). The results of the article review are that in implementing the empowerment carried out by the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, Bandung Regency with indicators of Stephen P. Robbins' Strategy Theory is still in a fairly good process.

Keywords: Cooperative Service; SMEs; Bandung district; umkm

PENDAHULUAN

Ketika melihat fenomena sosial selama satu atau dua tahun kebelakang maka kita akan memperhatikan adanya berita pandemi Coronavirus disease 2019, atau disingkat COVID-19. Efek yang ditimbulkan dari fenomena ini adalah perubahan kebiasaan masyarakat, kultur, bahkan mengikis sistem. Kegiatan-kegiatan secara besar serentak dihentikan, akses antar negara ditutup, beberapa pengawasan di negara-negara tertentu sangat ketat untuk memproteksi penyebaran virus ini. Tentu hal ini menyebabkan berhentinya perekonomian global. Jika kita melihat data dari berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) abstrak perekonomian Indonesia berdasarkan persepsi produk domestik bruto. Sebagai catatan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB ini adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik secara dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan (*Badan Pusat Statistik, n.d.*).

Perekonomian Indonesia sebagian besar adalah usaha mikro, kecil dan menengah bahkan salah satu lembaga survei menyatakan kekayaan harta empat orang terkaya setara dengan seratus juta orang termiskin, kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, sama dengan gabungan kekayaan seratus juta orang termiskin (*DW.com*). Selain itu BPS Jawa Barat mengungkapkan sensus ekonomi pada tahun 2016 bahwa presentase UMK nonpertanian menurut status usaha, 98,84 persen usaha mikro kecil dan 1,16 persen (Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Usaha, 2016) adalah usaha menengah besar (*USAHA MIKRO KECIL, n.d.*)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang diperbaharui pada Undang-Undang No. 11 tahun 2020 (*dkupp.semarangkab.go.id*). Karena masyarakat sebagai pelaku produktif oleh karena itu sangat penting perannya dalam perkembangan ekonomi nasional masyarakat karena dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara merata kepada masyarakat, berpengaruh dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Negara.

Gambaran perekonomian yang sudah dijelaskan bukan dimaksudkan untuk menganalisa lebih dalam tentang keilmuan ekonomi secara murni akan tetapi penulis ingin lebih memperdalam bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM tersebut. Untuk lebih sedikit mendalami perekonomian di Jawa Barat penulis ingin mendiskusikan data sensus ekonomi tahun 2016 tentang jumlah usaha/perusahaan di Jawa Barat.

Berikut jumlah usaha berdasarkan Kabupaten/Kota dan Skala Usaha di Jawa Barat pada table 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah usaha berdasarkan kabupaten/kota dan skala usaha di Jawa Barat

Kabupaten/Kota	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
Bogor	368.740	6.308	375.048	8,09
Sukabumi	266.945	2.057	269.002	5,80
Cianjur	249.221	1.587	250.808	5,41
Bandung	348.858	4.419	353.277	7,62
Garut	257.858	1.283	259.141	5,59
Tasikmalaya	187.458	610	188.068	4,06
Ciamis	138.877	824	139.719	3,01
Kuningan	94.090	795	94.885	2,05
Cirebon	250.162	2.442	252.604	5,45
Majalengka	155.419	1.422	156.841	3,38
Sumedang	115.039	1.162	116.203	2,51
Indramayu	189.325	1.721	191.046	4,12
Subang	168.486	1.292	169.778	3,66
Purwakarta	85.745	1.501	87.246	1,88
Karawang	230.654	2.952	233.606	5,04
Bekasi	225.844	5.198	231.042	4,98

Kabupaten/Kota	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
Bandung Barat	155.041	1.246	156.287	3,37
Pangandaran	59.990	303	60.293	1,30
Kota Bogor	83.515	2.891	86.406	1,86
Kota Sukabumi	39.059	923	39.982	0,86
Kota Bandung	333.112	10.826	343.938	7,42
Kota Cirebon	38.799	1.425	40.224	0,87
Kota Bekasi	193.619	9.437	203.056	4,38
Kota Depok	158.210	4.178	162.388	3,50
Kota Cimahi	55.851	1.059	56.910	1,23
Kota Tasikmalaya	89.488	1.625	91.113	1,97
Kota Banjar	25.553	343	25.896	0,56
Jumlah	4.564.958	69.849	4.634.807	100,00

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten Bandung berada di Soreang. Tahun 2020, penduduk kabupaten Bandung berjumlah 3.583.056 jiwa dengan kepadatan 2.026,62 jiwa/km² (*Jabarprov.go.id*). Melihat sekilas data sensus ekonomi 2016 UMK pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung merupakan daerah tertinggi kedua di Jawa Barat setelah kabupaten Bogor. Usaha Menengah Kecil tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi dan memberikan kontribusi yang sangat besar pada pembangunan khususnya perekonomian.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung yang merupakan Pemisahan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi, dan UKM di Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Koperasi dan UKM, yang meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta melaksanakan ketatausahaan Dinas (*peraturan.bpk.go.id*).

Jadi sudah jelas bahwa sesungguhnya organisasi yang seharusnya sangat berperan serta bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan UMKM di daerah kabupaten Bandung adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung. Untuk memperkuat landasan penulis menyajikan data perkembangan UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung pada table 1.2 sebagai berikut:

Tabel 2. Data Perkembangan umkm binaan dinas koperasi dan ukm Kabupaten Bandung tahun 2017-2020

Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha
14695	14974	15896	17755

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Bandung/Pemerintah menjelaskan mendapatkan tugas untuk melaksanakan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Dalam Meningkatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Pelaku Usaha Modal Besar Pada tabel 1.2 mungkin sudah terbilang cukup baik namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, langkah yang sudah dilakukan adalah pertama, menumbuhkan pelaku UMKM. Kedua, Fasilitasi Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal bagi produk UMKM. Ketiga, Meningkatkan jumlah omzet UMKM. Keempat, Perkembangan koperasi.

Kajian artikel yang mengenai strategi Dinas Koperasi dan UKM telah dilakukan oleh beberapa penulis. Misalnya, Adil Makmur Sentosa (Sentosa, 2018) dengan artikel yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM Kota Bekasi. Hasil dari kajian artikel tersebut yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kota Bekasi telah melaksanakan strategi dalam pemberdayaan UMKM Kota Bekasi. Selanjutnya, Suci Astari (Astari, 2019) artikel berjudul

Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Sektor UMKM. Hasil dalam kajian artikel ini adalah berbagai strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam mengembangkan UMKM merupakan strategi perkuatan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan melakukan promosi produk, strategi pemberdayaan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Perbedaan kajian peneliti dengan artikel tersebut yaitu terletak pada objek kajian. Objek kajian peneliti yaitu pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Peneliti menggunakan Teori Strategi dari Stephen P. Robbins dengan indikator dimensi: Inovasi, Diferensiasi Pasar, Jangkauan, Pengendalian Biaya (Cost Control).

Dengan demikian dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung. Maka dengan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul *"Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung"* fokus kajian pada instansi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, studi kasus Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Dalam menganalisis penulis menggunakan Teori Strategi dari Stephen P. Robbins dengan indikator dimensi : Inovasi, Diferensiasi Pasar, Jangkauan, Pengendalian Biaya (Cost Control). Tujuan penulis dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung.

METODE

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu, yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori dan menghasilkan data deskriptif. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan tersebut yaitu dengan studi pustaka, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, pengumpulan data dokumentasi. Penulis memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yaitu R. Dadan Ruhamat Kurnia, ST., ME. yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan usaha-usaha mikro. Informan pertama akan memberikan saran untuk memilih informan-informan selanjutnya karena dirasa cocok dalam permasalahan penelitian yang dibuat. Sehingga data yang dikumpulkan terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama. Untuk informan selanjutnya penulis juga mewawancarai pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.

Teknik analisis yang dipakai adalah model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *reduction data* (reduksi data), *display data* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel dengan judul Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung, dimana fokus penelitian adalah strategi dalam pemberdayaan UMKM dengan menggunakan Teori Stephen P. Robbins (Kusdi, 2009). Teori tersebut menggambarkan tahapan dalam menentukan kebijakan yang harus diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tahapan-tahapan yang menjadi variabel yang harus dilakukan adalah inovasi, diferensiasi pasar, jangkauan, dan pengendalian biaya.

Inovasi

Sesuai dengan fakta di lapangan peneliti temukan program-program inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah menurut peneliti masih dibawah standar efektif dan efisien. Pengawasan yang kurang baik menyebabkan terjadinya penyelewengan dilapangan seperti contoh kasus yaitu usaha yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaan fisiknya. Dampak yang diberikan dari adanya program tersebut juga ditemukan kurangnya perhatian banyak pelaku UMKM untuk mengikuti standar yang disediakan oleh pemerintah dan keterbatasan dari pelaku UMKM sendiri. Banyak dari pelaku UMKM yang cenderung fokus hanya pada pengembangan usaha tanpa berharap kepada pemerintah dan mohon maaf harus pemeliti katakana bahwa apabila pemerintah tidak mengganggu dengan kebijakan yang mempersulit pelaku UMKM maka pelaku usaha sudah bisa lebih baik dalam mengembangkan usahanya.

Dapat disimpulkan bahwa inovasi dari Dinas Koperasi dan UKM pada saat ini proyeksi yang sedang dilaksanakan seperti pembuatan database UMKM, sistem informasi bangkit UKM atau membangun galeri-galeri di daerah belum sepenuhnya selesai atau masih dalam proses sehingga output kepada pelaku UKM belum bisa dirasakan mayoritas pelaku usaha UMKM (khususnya yang jauh pada pusat/kantor pemerintahan Kabupaten Bandung) lebih banyak yang tidak merasakan dampak inovasi tersebut karena kurangnya mengikuti arus informasi pemerintah dan cenderung hanya fokus pada usaha yang ia jalani ketimbang yang merasakan manfaat.

Diferensiasi pasar

Masalah yang klasik sebagaimana kita ketahui adalah kurangnya modal yang cukup sebagai dana produksi produk. Para pelaku UMKM di Kabupaten Bandung sendiri masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi secara menyeluruh.

Analisis perihal strategi diferensiasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah. Kenyataan dilapangan tentu tidak akan sama persis apa yang dijelaskan dari pihak pemerintah tentu diperlukan pendalaman dan pencarian fakta lapangan. Peneliti sangat tertarik mendalami perihal perizinan dimana terdapat perizinan seperti Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, Sertifikat Halal, Hak Kekayaan Intelektual dan Produk Industri Rumah Tangga.

Dari analisis peneliti sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel dalam latar belakang jumlah pelaku usaha mikro kecil Kabupaten Bandung yang berjumlah 348.858 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan) pelaku usaha mikro kecil, hanya 17755 (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima puluh Lima) saja yang terdaftar artinya sekitar 1,964 % (Satu koma Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Persen) saja pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha bahkan jauh untuk mencapai setengah dari keseluruhannya. NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah perizinan paling dasar yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM untuk melanjutkan perizinan-perizinan lainnya. Tentunya dengan mudah dapat kita Tarik kesimpulan bahwa perizinan seperti IUMK, HAKI, PIRT, Halal dan lain sebagainya akan menunjukkan angka yang sama atau lebih kecil dari 17755 (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima puluh Lima). Uraian di atas merupakan analisis data dan belum mencakup pelaku usaha secara langsung selanjutnya peneliti akan merangkum hasil wawancara dengan para pelaku usaha dilapangan.

Dari wawancara peneliti dengan pelaku UKM dimulai dari usaha yang memiliki omset Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) perbulan sampai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta) perbulan narasumber yang menjadi fokus penelitian peneliti dalam perihal HAKI atau untuk menonjolkan loyalitas merek, pelaku UKM kurang memperhatikan standardisasi tersebut. Dalam bidang kuliner saja banyak yang belum memperhatikan perizinan yang mengakibatkan cukup sulit memasuki ritel-ritel dan memasarkan produknya. Hal tersebut bisa dijadikan indikator bahwa banyaknya UMKM yang mengalami stagnasi adalah kurangnya perhatian pada hal tersebut.

Jangkauan

Dalam Strategi jangkauan menurut Robbins (dalam kusdi, 2009:90), strategi jangkauan adalah penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi ragam atau jenis konsumen, cakupan geografinya, dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dinas Koperasi dan UKM memiliki tanggungjawab untuk memfasilitasi para pelaku UMKM di Kabupaten Bandung untuk melaksanakan strategi jangkauan, agar usaha yang mereka miliki akan meningkat.

Analisis peneliti terkait dengan strategi jangkauan oleh Dinas Koperasi dan UKM agar terciptanya UMKM yang dapat berdaya saing. Sebagai studi kasus dalam program kerja Galeri dan Mall UMKM di Kabupaten Bandung yang memajang UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung secara selektif pelaku UMKM yang terbaik dapat memasarkan produknya di galeri dan Mall UMKM yang terletak di Gedung Sabilulungan Kabupaten Bandung. Untuk informasi bagi pembaca, Gedung Sabilulungan Kabupaten Bandung terletak di Pusat Pemerintahan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang mana secara geografis terletak di Barat Data Kabupaten Bandung. Hal itu bisa penulis analogikan bahwa telah terjadi ketimpangan yang menyebabkan tidak meratanya program tersebut. Agar memudahkan pembaca peneliti memberikan analogi sederhana sebagai berikut; Soreang terletak di ujung Barat Laut Kabupaten Bandung, sedangkan Rancaekek, Majalaya, Cicalengka dan Nagreg terletak di Timur Laut, Timur dan memerlukan waktu sekitar 1 jam 30 menit Perjalanan untuk sampai ke Lokasi. Untuk membeli keperluan sehari-hari seperti sembako dan lain sebagainya sangat tidak efektif dan efisien membeli keperluan ke tempat lokasi sejauh 1 jam 30 menit maka pembeli akan lebih memilih ritel ketimbang melakukan perjalanan jauh ini sangat logis.

Hal itu yang menyebabkan UMKM tidak bisa bersaing di daerah dan cenderung kalah oleh ritel-ritel besar dan ternama. Alangkah indahnya apabila di setiap Kecamatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung menyediakan Mall khusus UMKM sehingga pelaku usaha mikro dan kecil memasarkan produknya di Mall Galeri UMKM tentunya dapat bersaing dengan perusahaan kapitalis besar dalam kebutuhan sehari-hari yakni sembako dan kedepannya bisa jadi disetiap Desa terdapat Galeri UMKM atau bahkan sampai tingkatan RW. Seandainya hal itu dapat dilaksanakan maka gerakan belanja ke warung tetangga atau gerakan ekonomi umat bukan lagi sekadar slogan belaka.

Strategi jangkauan sangat penting fokusnya kepada pemerintah dalam memperluas Galeri dan Mall khusus UMKM dalam mengembangkan UMKM karena dapat memperkuat dan memperluas suatu usaha kecil di masyarakat Kabupaten Bandung. Pemerintahan harus bisa lebih untuk meningkatkan kualitas UMKM yaitu dengan sosialisasi tentang pendidikan dan pelatihan, fasilitasi perizinan, fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha, fasilitasi perkuatan permodalan, dan fasilitasi pemasaran. Namun peran pelaku usaha sangat penting, karena jika pemerintah telah membuat program sebaik mungkin, sangat baik apabila para pelaku UMKM ikut serta dalam program tersebut.

Pengendalian biaya

Strategi pengendalian biaya menurut Robbins (Kusdi, 2009) adalah sejauh mana organisasi mengontrol biaya atau anggaran secara ketat. Dinas Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa dalam hal ini (cost-control) untuk anggaran seperti dana hibah dan pemberian modal dari pemerintah sudah tidak ada karena sudah memiliki aturan bahwa dalam hal permodalan harus ke perbankan sebagai penyedia pinjaman dan tentunya berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Analisis peneliti perihal pengendalian biaya dari Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan program kerja. Yaitu pelatihan kewirausahaan, intermediasi dan pembuatan katalog profil UMKM. Pertama dimulai dari pelatihan kewirausahaan, setelah peneliti menelusuri pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Bandung telah dilaksanakan 11 November 2019 di Kecamatan Margaasih, 14 Oktober 2020 di Kecamatan Cileunyi dan 15 Juni 2021 di Kecamatan Solokan Jeruk dengan sumber data yakni media online. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pelatihan workshop ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun di tiap kecamatan. Kedua yaitu substansi (tematik), pemasaran promosi, kemitraan, intermediasi dan pembuatan katalog profil UMKM, dalam hal ini sangat disayangkan bahwa peneliti tidak dapat mencari kebenaran fakta atau belum dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat dan para pelaku khususnya usaha mikro di Kabupaten Bandung. Peneliti sangat menyayangkan dengan anggaran yang disediakan bagi Dinas Koperasi dan UKM dengan nominal yang tidak terlalu kecil akan tetapi hanya melaksanakan kegiatan seremonial biasa dalam pengalokasian dana (cost-control) tersebut

Strategi pengendalian biaya untuk melaksanakan program kerja tentu ada dana yang dibagi pada Dinas Koperasi dan UKM hanya saja setiap tahun tidak menentu tergantung pendapatan daerah dan perihal modal untuk pelaku UMKM sudah di atur bahwa pelaku UMKM harus mengurus permodalannya dengan pihak perbankan. Untuk anggaran yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan program kerja, analisis penulis menilai bahwa anggaran yang tersedia

kurang begitu efektif jika hanya digunakan untuk pelatihan workshop satu kali dalam satu tahun pada satu Kecamatan saja.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dari hasil pembahasan bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan indikator Teori Strategi Stephen P. Robbins masih dalam proses cukup baik.

Beberapa kesimpulan dari indikator Teori Strategi Stephen P. Robbins, yaitu pertama, Inovasi seperti pembuatan database UMKM dalam bentuk aplikasi adalah program yang sedang dilaksanakan dan belum dapat dirasakan oleh Pelaku UMKM dan Masyarakat sedangkan Mall dan Galeri UMKM belum dirasakan menyeluruh di 31 Kecamatan. Kedua, diferensiasi pasar kuliner memerlukan standar kualitas agar mendapatkan perizinan serta dapat menjadi produk unggulan di Kabupaten Bandung. Ketiga, Jangkauan walaupun terdapat cukup banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dalam *marketplace* akan tetapi masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bandung yang memiliki jangkauan yang kecil karena kurangnya penguasaan teknologi. Keempat, Pengendalian Biaya rata-rata permasalahan yang sering dijumpai adalah masalah modal dan hal tersebut erat hubungannya dengan koperasi dan perbankan masalah yang sering ditemui adalah beratnya dalam pembayaran bunga yang menghasilkan suatu kesimpulan pelaku UMKM menginginkan penyediaan modal yang tidak menggunakan sistem bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, S. (2019). Strategi Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved October 15, 2021, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
- Di Indonesia, Kekayaan 4 Orang Terkaya Setara Kekayaan 100 Juta Penduduk Termiskin | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 23.02.2017. (n.d.). Retrieved October 15, 2021, from <https://www.dw.com/id/di-indonesia-kekayaan-4-orang-terkaya-setara-kekayaan-100-juta-penduduk-termiskin/a-37688128>
- Home - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. (n.d.). Retrieved October 15, 2021, from <https://diskop.bandungkab.go.id/>
- Kabupaten Bandung - Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (n.d.). Retrieved October 15, 2021, from <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1044>
- Klasifikasi UMKM Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 *. (n.d.). Retrieved October 15, 2021, from <https://dkupp.semarangkab.go.id/2021/01/07/klasifikasi-umkm-menurut-uu-nomor-20-tahun-2008/>
- Kusdi. (2009). Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- PERDA Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved October 15, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54211>
- Sentosa, A. M. (2018). STARTEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UKM KOTA BEKASI. PARAMETER, 3(2). <https://doi.org/10.37751/PARAMETER.V3I2.26>
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- USAHA MIKRO KECIL. (n.d.).